

**OPTIMALISASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM AKTIVASI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL BERBASIS BUDAYA SIBALIPARRI OLEH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT**

Muhammad Ahsan Arianto

NPP. 32.0982

Asdaf Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : ahsanariantom@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Maris Gunawan Rukmana, S. IP., M. Si.

ABSTARCT

Problem Statement/Background (GAP): Low achievement of Digital Population Identity activation in Majene Regency, West Sulawesi Province. **Purpose:** The main objective of this study is to analyze a clear picture of the achievements of Digital Population Identity (IKD) activation in Majene Regency. **Method:** Descriptive qualitative methods are used to analyze the impact of the three dimensions of the Optimization theory (Mardiasmo-2018) on the achievement of Digital Population Identity Activation in Majene Regency, West Sulawesi Province. **Result:** The results of the study showed that the Sibaliparri' culture-based outreach program, known as "Jepa Dokkang", proved to be optimal in one dimension with initial data of 2.4% moving to 3.09% in increasing community participation in the activation of Digital Population Identity (IKD) in Majene Regency, especially in remote areas. The Sibaliparri' culture which emphasizes the values of mutual cooperation, cooperation, equality, and family is a key factor in supporting the success of this program. However, the study also found that the implementation of the program still faces a number of obstacles, including limited digital literacy in the community, uneven network infrastructure conditions, and lack of intensive education and socialization. For this reason, it is necessary to improve service infrastructure, continuous digital education, and strengthen collaboration between stakeholders in order to optimize this Sibaliparri' culture-based outreach program. **Conclusion:** Community participation in the Jemput Bola Program in the Activation of Digital Population Identity Based on Sibaliparri Culture has gone quite well, this is due to the good collaboration of the government in this case the Population and Civil Registration Service with the community. In order to increase the achievement value of the Digital Population Identity Activation, it is recommended to complete the supporting facilities and infrastructure for the jemput bola service and increase collaboration between stakeholders in the regional government for the implementation of IKD in every community service.

Keywords: Digital Population Identity (IKD), Jemput Bola Program, Sibaliparri' Culture, Optimization Theory, Community Participation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. **Tujuan:** Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis gambaran yang jelas mengenai capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene. **Metode:** Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis dampak dari tiga dimensi teori Optimalisasi (Mardiasmo-2018) terhadap capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program jemput bola berbasis budaya Sibaliparri', yang dikenal dengan sebutan "Jepa Dokkang", terbukti optimal di salah satu dimensi dengan data awal yakni 2,4% bergerak ke 3,09% dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene, khususnya di wilayah terpencil. Budaya Sibaliparri' yang mengedepankan nilai gotong royong, kerja sama, kesetaraan, dan kekeluargaan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program ini. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan literasi digital masyarakat, kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi yang intensif. Untuk itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana pelayanan, edukasi digital secara berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi antarstakeholder guna mengoptimalkan program jemput bola berbasis budaya sibaliparri' ini. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam Program Jemput Bola Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Berbasis Budaya Sibaliparri' telah berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat. Guna meningkatkan nilai capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung layanan jemput bola tersebut dan meningkatkan kolaborasi antarstakeholder di lingkup Pemerintah daerah untuk penerapan IKD di setiap pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Program Jemput Bola, Budaya Sibaliparri, Teori Optimasi, Partisipasi Masyarakat.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kependudukan adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai variabel demografi serta menggambarkan hubungan antara perubahan populasi dengan variabel lain, contohnya sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan, dan sebagainya (Hutasoit, 2017). Identitas kependudukan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengandung informasi pribadi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki identitas kependudukan yang unik, yang dikenal sebagai NIK, yang berlaku seumur hidup. Setelah mencatat biodata penduduk, lembaga yang berwenang menerbitkan NIK untuk mendukung penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat tinggal penduduk tersebut. Identitas Kependudukan dalam hal ini KTP sebelumnya telah mengalami perubahan di tahun 2009 menjadi KTP-el sebelum menjadi Identitas Kependudukan Digital di tahun 2022 diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai program inovasi yang merupakan langkah maju dalam digitalisasi data kependudukan, yang bertujuan untuk mempermudah akses dan pengelolaan identitas warga negara dengan lebih efisien dan aman melalui pemanfaatan sumber daya digital. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menargetkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30% dari total wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman di setiap Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Namun di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, hingga 15 Oktober 2024, capaian aktivasi IKD baru mencapai 3,09% atau 3.333 orang dari total 107.777 wajib KTP-el. Angka ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan akses jaringan di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur aktivasi IKD, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Sebagai solusi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene meluncurkan program Jemput Bola “Jepa Dokkang” berbasis budaya lokal Sibaliparri’, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di pelosok, sekaligus meningkatkan capaian aktivasi IKD secara optimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene ini. Faktor sosialisasi dan komunikasi merupakan salah satunya. Belum terlaksananya sosialisasi mengenai IKD secara menyeluruh di Kabupaten Majene menyebabkan masyarakat Kabupaten Majene masih belum mengetahui apa itu IKD, bagaimana proses aktivasinya dan apa saja manfaat dari penggunaan IKD itu sendiri. Menunjukkan pada penelitian yang telah dijadikan referensi dan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Restu Widyo (2023), Syafa Armia Zafira (2024), Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman (2023), Agus Widiyarta dan Isni Humaidah (2023), serta Rania Riska Vindy Aprilia dan

Kalvin Edo Wahyudi (2023), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih banyak berfokus pada implementasi layanan administrasi kependudukan di wilayah perkotaan dengan dukungan infrastruktur yang relatif memadai, serta menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik pendekatan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator output, outcome, dan impact sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018). Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang mengkaji program jemput bola dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital berbasis kearifan lokal masyarakat, khususnya budaya Sibaliparri' yang merupakan budaya khas masyarakat Mandar di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Budaya Sibaliparri' memiliki nilai-nilai gotong royong, kesetaraan, kekeluargaan, dan saling membantu yang potensial untuk dijadikan pendekatan pelayanan publik, khususnya dalam program jemput bola aktivasi IKD di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses jaringan internet dan rendahnya literasi digital. Selain itu, Belum terkonektivitasnya IKD dengan lembaga – lembaga pelayanan publik menjadi permasalahan berikutnya, dimana kerja sama yang menunjukkan pemanfaatan dan implementasi IKD pada sektor – sektor pelayanan publik akan mempengaruhi pandangan masyarakat akan kebutuhan untuk melakukan aktivasi IKD. Hal ini berkaitan langsung dengan permasalahan selanjutnya yakni kesadaran masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merasa belum membutuhkan IKD dikarenakan belum adanya penggunaan IKD pada berbagai pelayanan di masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang masih belum melakukan aktivasi atau sudah melakukan aktivasi namun tidak mengaktifkan aplikasi IKD dikarenakan belum adanya penggunaan IKD tersebut. Proses aktivasi yang masih dilaksanakan secara manual yakni masyarakat harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut membuat masyarakat enggan untuk melakukan aktivasi IKD. Masyarakat memiliki *statement* bahwa apabila IKD merupakan proses digitalisasi maka seharusnya proses aktivasinya pun sudah dapat dilakukan secara digital atau online dalam hal ini dapat dilakukan di rumah ataupun dimana saja selama pendaftar terhubung dengan jaringan yang digunakan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD, pandangan masyarakat terkait IKD juga mempengaruhi pencapaian target aktivasi IKD di Kabupaten Majene. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis budaya Sibaliparri' melalui program Jepa Dokkang, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi geografis dan budaya lokal, serta mempercepat capaian target nasional aktivasi IKD di Kabupaten Majene.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah penelitian terdahulu yang membahas implementasi dan efektivitas program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai daerah. Penelitian oleh Permadi dan Rokhman (2023) dengan judul *Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi* menunjukkan bahwa IKD berfungsi sebagai alat pembuktian

identitas melalui verifikasi data aktivasi KTP elektronik serta sebagai upaya pengamanan identitas digital melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan data. Penelitian Firmansyah dan Anisykurlillah (2023) menemukan adanya peningkatan antusiasme masyarakat Desa Kandangan dalam mengaktifkan IKD, yang bertujuan memudahkan dan mempercepat pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya, Sasongko (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan IKD dapat diintegrasikan dalam berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan agar berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Putra dkk. (2014) melalui penelitian berjudul *Inovasi Pelayanan E-KTP Berbasis Aplikasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang* menitikberatkan pada inovasi pelayanan IKD beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Sementara itu, Rohmah (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Lamongan membahas transformasi layanan administrasi kependudukan melalui penerapan IKD dan akta berbasis online, serta manfaat dan tantangannya. Salsa Bella dan Widodo (2023) juga meneliti tentang implementasi aplikasi IKD dalam menunjang pelayanan publik di Kecamatan Tambaksari dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian Yulanda dan Frinaldi (2023) membahas inovasi program IKD dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan di Indonesia beserta kendala dan tantangannya. Christy dan Isbandono (2024) berfokus pada efektivitas pelayanan pembuatan KTP Digital di Dinas Dukcapil Kota Surabaya, sedangkan Oktaviani dkk. (2024) mengkaji pelaksanaan inovasi pelayanan KTP Digital melalui aplikasi IKD di Kabupaten Bojonegoro. Terakhir, Romawati dkk. (2024) berupaya meningkatkan cakupan aplikasi IKD di Kelurahan Wonorejo melalui berbagai strategi pelayanan. Selain itu, Diar Dwi Abrianto dan Heri Fathurahman dalam studi mereka di Kota Surakarta memberikan perspektif kebijakan yang menunjukkan bahwa desain kebijakan yang terstruktur dan konsisten dapat mendukung keberhasilan aktivasi IKD. Keberhasilan Surakarta dalam cakupan kepesertaan warga wajib KTP-el didukung oleh pendekatan yang memperhatikan aspek legalitas dan kepastian hukum dokumen digital. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa selain aspek teknis dan sosialisasi, kebijakan yang matang dan berkelanjutan juga menjadi penentu keberhasilan aktivasi IKD. Dari sejumlah penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi program jempot bola dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital berbasis budaya lokal, khususnya budaya Sibaliparri' yang merupakan nilai budaya masyarakat Mandar di Kabupaten Majene. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan teori implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori optimalisasi pelayanan publik menurut Mardiasmo (2018) dengan indikator output, outcome, dan impact. Hal inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang ingin diisi melalui penelitian ini.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, di mana konteks penelitian ini berfokus pada optimalisasi pencapaian target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene dengan kearifan lokal yakni Jempot Bola Berbasis Budaya Sibaliparri' yang saat ini masih berada jauh di bawah target nasional yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-

hambatan yang mempengaruhi rendahnya tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Majene serta upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori optimalisasi menurut Mardiasmo (2018:112), yang menitikberatkan pada pencapaian output, outcome, dan impact secara efektif dan efisien.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene, hambatan-hambatan yang mempengaruhi capaian aktivasi IKD, serta upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan ke depannya, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Majene dapat memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.

II Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menurut Creswell (2023:208) untuk menganalisis optimalisasi program jemput bola dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene. Dalam metode kualitatif ini, Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral, di mana fenomena tersebut dapat ditemukan setelah peneliti melakukan wawancara terhadap partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum hingga mendapatkan informasi yang mendalam. Berlandaskan pada Simangunsong (2016) memaparkan dalam sesuatu penelitian ada 2 tipe data, ialah: 1.) Data Primer: Data primer mencakup wawancara, observasi, serta kuesioner atau angket yang disebarkan secara langsung. Data ini bersifat baru dan asli. 2.) Data Sekunder: Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, dan laporan, yang dapat melengkapi atau mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi data aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diperlukan, serta dokumen terkait lainnya yang mungkin disarankan oleh informan. Data yang diperoleh berupa kata-kata atau teks, kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan deskripsi serta interpretasi makna yang lebih dalam, lalu dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell, 2013:4-5). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pegawai yang Bertugas dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Berbasis Budaya Sibaliparri', tiga orang ASN yang belum melakukan aktivasi IKD, serta masing-masing dua orang mahasiswa yang telah melakukan perekaman KTP-el. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan menurut

Creswell (2013: 239) yang terdiri atas: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi dari Mardiasmo (2018: 112) dengan indikator pencapaian output, outcome, dan impact untuk mengukur sejauh mana optimalisasi program jemput bola dapat meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene. Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi yang digagas oleh Mardiasmo (*Mardiasmo, 2018 : 112*) yang menyatakan bahwa optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan tersebut yang dipandang dari sudut usaha dalam memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan secara efektif dan efisien mencakup pencapaian *output*, pencapaian *outcome*, dan pencapaian *impact*.

III Hasil dan Pembahasan

3.1 Optimalisasi Program Jemput Bola Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

a. Pencapaian Output

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Memberi Pelayanan

Dalam pelayanan IKD seluruh aparatur atau operator diharuskan untuk memahami bagaimana sistematis dalam melakukan aktivasi IKD. Petugas yang khusus menangani IKD pada Disdukcapil Kabupaten Majene sudah dibekali kompetensi terkait pelayanan IKD dengan lebih dalam. Operator pada bidang PIAK yang bertugas sebagai tim IKD diberikan pelatihan terkait prosedur dalam melakukan aktivasi IKD pada SIAK terpusat yang diawali dari pendaftaran penduduk melalui wajib E-KTP; registrasi identitas ; melakukan scan code QR ; hingga pada akhirnya akan muncul tampilan layanan pada IKD. Operator IKD juga dibekali dengan pendekatan sistematis untuk menemukan pemecahan masalah yang bersifat kompleks (*troubleshooting*) pada saat pelayanan aktivasi yang sedang berlangsung sehingga aparatur tidak akan gugup jika terjadi permasalahan terutama terkait jaringan. Aktivasi IKD dilayani secara langsung oleh operator di Kantor Disdukcapil Kabupaten Majene baik secara offline maupun secara online yang sedang diujicobakan melalui *discord* Sibaliparri'. Hal ini dilakukan guna menunjang percepatan aktivasi IKD di Kabupaten Majene. Meskipun telah membuka ujicoba pelayanan secara online untuk memudahkan masyarakat, ternyata jumlah aktivasi yang dilakukan masih belum sesuai harapan.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Sarana dan prasarana yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Majene sejauh ini termasuk dalam kategori lengkap untuk melaksanakan pelayanan di kantor. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan *mobile* atau jemput bola, dimana apabila rencana untuk bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Majene tentunya akan membutuhkan lebih banyak perangkat *mobile* untuk melakukan jemput bola pelayanan aktivasi IKD ke sekolah – sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Majene. Untuk saat ini perangkat *mobile* yang ada hanya cukup untuk melayani

masyarakat umum di mall pelayanan publik. Selain itu sarana penunjang pelayanan *mobile* seperti jaringan yang khusus untuk melakukan pelayanan IKD masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih menumpang pada jaringan pelayanan E-KTP sehingga diperlukan tambahan jaringan sebagai koneksi dalam pelayanan aktivasi IKD. Mahknunah & Choiriyah (2021) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana layanan Dukcapil di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program layanan, termasuk IKD. Ketersediaan fasilitas yang memadai, pelayanan yang cepat dan ramah, serta sistem antrian yang tertib meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program baru, termasuk digitalisasi identitas. Optimal tidaknya kerja Disdukcapil Kabupaten Majene dinilai dari bagaimana mereka menciptakan lingkungan layanan yang kondusif untuk transformasi digital.

3. SOP Pelayanan IKD

Standar pelayanan operasional yang diberlakukan pada Disdukcapil Kabupaten Majene sesuai dengan alur aktivasi yang disebarakan oleh Ditjen Dukcapil yang dicantumkan pada presentasi pengenalan IKD pada pertengahan tahun 2022 kemarin. Pelayanan aktivasi IKD dimulai dengan mengunduh aplikasi IKD dilanjutkan dengan melakukan registrasi secara menyeluruh, dan apabila registrasi berhasil akan muncul kode aktivasi pada email pendaftar. Selanjutnya pendaftar wajib melakukan aktivasi dengan kode aktivasi, setelah berhasil masuk atau *log in* akan muncul tampilan beranda utama dan terakhir pendaftar dapat mengubah kata sandi yang hanya diketahui oleh pendaftar.

b. Pencapaian Outcome

1. Aktivasi IKD di Setiap Masyarakat

Pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Majene yang telah berusia 17 tahun ke atas dan telah wajib memiliki KTP-el. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene per 15 Oktober 2024, jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD mencapai 3.333 orang atau sebesar 3,09% dari total 107.777 wajib KTP-el. Angka ini menunjukkan peningkatan meskipun masih jauh dari target nasional sebesar 30% di tahun 2024. Pelayanan aktivasi ini terus dilakukan melalui program jemput bola berbasis budaya Sibaliparri', khususnya dengan kegiatan Jepa Dokkang, untuk memperluas jangkauan aktivasi hingga ke pelosok desa dan daerah terpencil di Kabupaten Majene. Adapun data aktivasi IKD per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Data Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Dihitung Sampai Rentang Waktu
Desember 2024

NO	WILAYAH	KODE	TOTAL	PERCEN IKD	BELUM AKTIVASI	AKTIF	AKTIF PRR	TIDAK AKTIF
1	BANGGAE	760501	983	3,16	38	945	5	-
2	PAMBOANG	760502	357	2,08	18	339	1	-
3	SENDANA	760503	495	2,82	10	485	1	-
4	MALUNDA	760504	128	0,94	2	126	2	-
5	ULUMANDA	760505	112	1,63	5	107	4	-
6	TAMMERODO SENDANA	760506	161	1,76	5	156	2	-
7	TUBO SENDANA	760507	96	1,40	4	92	0	-
8	BANGGAE TIMUR	760508	1.124	4,66	41	1.083	6	-
KAB. MAJENE		7605	3.456	2,73	123	3.333	21	-

Sumber : Data Pelayanan SIAK Dinas DUKCAPIL Kabupaten Majene, 2024

2. Kesadaran Masyarakat Dan Instansi Pemerintah Terkait Manfaat dan Fungsi Diaktifkannya IKD

Kesadaran masyarakat Kabupaten Majene terhadap manfaat dan fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah, terlihat dari banyaknya masyarakat yang belum memahami apa itu IKD dan prosedur aktivasinya. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi serta belum optimalnya implementasi penggunaan IKD di sektor pelayanan publik, sehingga masyarakat belum merasakan urgensi dan manfaat langsung dari aktivasi IKD. Sementara itu, kesadaran instansi pemerintah di Kabupaten Majene dinilai sudah optimal, ditandai dengan adanya kerja sama aktif antarinstansi untuk pelaksanaan aktivasi IKD di lingkungan ASN. Pemerintah menyadari pentingnya IKD dalam mendukung inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Berdasarkan dua indikator pencapaian outcome tersebut, tingginya kesadaran instansi diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan capaian aktivasi IKD, dan menciptakan permintaan penggunaan IKD di sektor pelayanan publik Kabupaten Majene.

c. Pencapaian Impact

1. Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene

Berdasarkan indikator pencapaian impact, peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan hasil yang diharapkan dari berbagai upaya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Peningkatan aktivasi IKD terus berjalan meskipun masih secara perlahan, melalui pelayanan di kantor, pelayanan mobile, serta program IKD Goes to OPD dan rencana IKD Goes to School bagi mahasiswa dan siswa wajib KTP-el. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Majene juga sedang mengembangkan layanan aktivasi IKD berbasis online melalui Discord Sibaliparri' guna memperluas jangkauan layanan. Meskipun capaian aktivasi IKD belum mencapai target nasional 30%, Disdukcapil Kabupaten Majene terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan secara bertahap, dengan kesadaran bahwa optimalisasi pelayanan aktivasi IKD merupakan proses jangka panjang yang memerlukan waktu, strategi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

3.2 Hambatan dalam optimalisasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

1. Belum terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh

Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene hingga saat ini belum terlaksana secara menyeluruh, sebab baru menjangkau kalangan ASN di lingkup OPD. Sosialisasi kepada siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum belum dapat dilakukan karena Disdukcapil Kabupaten Majene masih fokus pada perekaman E-KTP untuk penduduk usia 17 tahun ke atas dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Keterbatasan anggaran untuk transportasi, sarana prasarana, dan konsumsi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat luas. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat belum mengetahui apa itu IKD, prosedur aktivasi, serta manfaat penggunaannya. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan beberapa informan, baik dari ASN, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang mengaku belum pernah mengetahui tentang IKD. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hutasoit dan Gaol (2023) yang mengkaji implementasi kebijakan pelayanan KTP-el di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan KTP-el belum berjalan maksimal akibat berbagai kendala internal, antara lain kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, keterbatasan alat perekaman dan jaringan, serta kompetensi pegawai yang belum memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas digital juga menjadi faktor penghambat utama. Sosialisasi dinilai menjadi kunci penting dalam memperkenalkan inovasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami fungsinya dan terdorong untuk melakukan aktivasi.

2. Belum terkoneksi dengan lembaga – lembaga pelayanan publik.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene adalah belum terkoneksi dengan lembaga pelayanan publik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan surat himbauan terkait penyelenggaraan IKD kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun belum ada surat edaran atau perintah resmi yang mewajibkan penggunaan IKD pada layanan perbankan, kesehatan, imigrasi, dan pelayanan publik lainnya. Kondisi ini membuat masyarakat belum merasakan urgensi dan manfaat langsung dari kepemilikan IKD. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, masyarakat merasa bingung kapan dan di mana harus menggunakan IKD karena belum adanya penerapan nyata di pelayanan publik. Akibatnya, beberapa masyarakat yang sudah melakukan aktivasi bahkan memilih menghapus aplikasi IKD karena merasa belum ada fungsinya. Hal ini menjadi kendala serius yang harus segera diatasi agar aktivasi IKD dapat meningkat melalui konektivitas dengan berbagai layanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

3. Belum tercapainya sistem digitalisasi yang diharapkan

Belum tercapainya sistem digitalisasi yang diharapkan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene. Meskipun berbasis digital, proses aktivasi IKD masih dilakukan secara manual dengan kehadiran langsung ke kantor Disdukcapil atau melalui pelayanan jemput bola, yang dinilai masyarakat tidak praktis. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa proses aktivasi seharusnya bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor, sebagaimana layanan digital lain seperti transportasi daring. Selain itu, gangguan jaringan saat pelayanan jemput bola ke OPD-OPD menjadi kendala teknis yang sering dihadapi, di mana server down atau koneksi lambat menghambat proses aktivasi, membuat masyarakat malas menunggu, bahkan enggan melanjutkan aktivasi. Hambatan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan menurunnya citra pelayanan Disdukcapil Kabupaten Majene di mata masyarakat.

4. Kurangnya tingkat kesadaran dan kemampuan Informasi dan Teknologi (IT) masyarakat

Kurangnya tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene. Meskipun berada di wilayah perkotaan, masih banyak masyarakat, khususnya usia lanjut dan sebagian ASN di atas 40 tahun, yang belum memahami penggunaan smartphone secara optimal, terutama fitur-fitur digital seperti email dan pemindaian barcode yang diperlukan dalam proses aktivasi IKD. Hal ini menyebabkan rendahnya respon masyarakat terhadap program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh pihak Disdukcapil Kabupaten Majene, kemampuan IT masyarakat sangat menentukan keberlangsungan program aktivasi IKD. Oleh karena itu, peran

operator atau petugas pendamping yang berkompeten dalam mengarahkan proses aktivasi menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat memahami prosedur dan manfaat IKD.

5. Pelayanan Perekaman KTP-el Persiapan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024

Menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, Disdukcapil Kabupaten Majene memfokuskan prioritas layanan administrasi kependudukan pada perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) bagi seluruh warga, khususnya pemilih pemula. Karena perekaman KTP-el menjadi syarat utama penggunaan hak pilih, alokasi waktu, tenaga, dan fasilitas lebih banyak diarahkan untuk kegiatan ini. Akibatnya, pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi tertunda dan berjalan secara terbatas. Meskipun IKD merupakan bagian dari program transformasi digital pelayanan publik, pelaksanaannya di Kabupaten Majene belum berjalan optimal karena masih kalah prioritas dibandingkan agenda nasional yang mendesak dalam waktu dekat.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam optimalisasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

1. Menyusun rencana pelayanan *mobile* atau jemput bola sibaliparri' ke seluruh sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kabupaten Majene.

Pelayanan *mobile* atau jemput bola menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene, mengingat banyak masyarakat enggan datang ke kantor Disdukcapil karena alasan biaya dan jarak. Disdukcapil Kabupaten Majene sebenarnya telah merencanakan jemput bola ke sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan lingkungan kelurahan sebagai perluasan dari kegiatan sebelumnya yang menyasar OPD. Namun, rencana tersebut tertunda akibat fokus pelayanan perekaman KTP-el untuk persiapan Pemilu 2024 yang menyita sebagian besar waktu dan tenaga aparatur. Meski demikian, pelayanan jemput bola dinilai sangat penting karena memungkinkan Disdukcapil untuk langsung menjangkau masyarakat, mengetahui siapa saja yang belum melakukan aktivasi, sekaligus memberikan sosialisasi terkait prosedur, manfaat, dan fungsi IKD secara langsung di lapangan.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.

Salah satu upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Majene dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah dengan memberikan informasi langsung kepada masyarakat yang berkunjung ke kantor Disdukcapil, khususnya kepada pemohon layanan yang telah memiliki E-KTP. Petugas loket pelayanan diarahkan untuk menginformasikan manfaat dan prosedur aktivasi IKD serta mengajak masyarakat melakukan aktivasi saat itu juga. Diharapkan, masyarakat yang telah melakukan aktivasi

dapat menyebarkan informasi tersebut kepada lingkungan sosial di sekitarnya. Meskipun metode ini belum memberikan dampak signifikan, penyebaran informasi secara bertahap dari mulut ke mulut dinilai cukup efektif sebagai langkah awal di tengah belum meratanya sosialisasi resmi ke masyarakat luas.

3. Membuka pelayanan *online* melalui *discord* Sibaliparri'

Pelayanan online melalui platform Discord Sibaliparri' merupakan inovasi Disdukcapil Kabupaten Majene untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tanpa harus datang langsung ke kantor. Inovasi ini berbasis budaya Sibaliparri' yang mengedepankan gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan serta memperbaiki data kependudukan melalui media digital. Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksud ialah komunikasi kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Liliwiri dalam Pabisa (2021: 40-53) menjelaskan bahwa terdapat tiga model komunikasi, yaitu komunikasi searah, komunikasi dua arah dengan umpan balik, dan komunikasi transaksi. Dalam konteks komunikasi publik digital, Madjid et al. (2024) menekankan bahwa keberhasilan layanan berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah, baik secara interpersonal maupun digital. Komunikasi yang responsif, transparan, dan edukatif mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian mereka juga menyoroti pentingnya membangun *engagement* melalui kanal digital yang interaktif serta strategi komunikasi dua arah yang inklusif terhadap berbagai segmen masyarakat. Melalui layanan yang dinamai Dukcapil Via Discord (DVD), masyarakat dilayani secara terorganisir dalam ruang virtual yang menyerupai suasana kantor, dengan sistem video call dan ruang tunggu daring. Upaya ini menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan digital yang sepenuhnya dapat dilakukan secara virtual. Hingga kini, layanan tersebut telah membantu aktivasi sekitar 160 orang dan masih terus dikembangkan, termasuk rencana penerapan fitur face ID dan sistem registrasi mandiri, guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan data. Jika telah optimal, inovasi ini akan disosialisasikan secara luas sebagai solusi pelayanan digital yang berbasis budaya lokal

4. Mengajukan permohonan kerjasama kepada pemerintah daerah

Kerjasama antara Disdukcapil dengan lembaga-lembaga pelayanan publik sangat penting dalam meningkatkan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya IKD melalui penerapannya dalam berbagai layanan publik. Ketika masyarakat melihat langsung manfaat IKD dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses check-in di bandara atau transaksi di bank, mereka akan merasa perlu untuk segera melakukan aktivasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ilham K., Petugas Aktivasi IKD, bahwa rendahnya minat masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman tentang kegunaan IKD. Oleh karena itu, Disdukcapil Kabupaten Majene berupaya menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah agar penggunaan IKD mulai diterapkan secara bertahap di sektor-sektor pelayanan publik.

Strategi ini menjadi langkah nyata dalam mengoptimalkan fungsi IKD sebagai alat identitas digital yang efisien serta memperkuat tata kelola data kependudukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan salah satu temuan penting dalam penelitian ini, yaitu kesulitan yang dialami oleh masyarakat lanjut usia dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Firmansyah dan Anisykurlillah (2023) yang menyebutkan bahwa kelompok lansia mengalami hambatan dalam mengakses teknologi dan informasi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Yulanda dan Frinaldi (2023), yang menjelaskan bahwa implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, terutama kelompok lanjut usia dan mereka yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Selain itu, penelitian oleh Oktaviani dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan KTP digital berbasis teknologi menjadi sulit dipahami dan dioperasikan oleh masyarakat lansia, disebabkan oleh adanya ketertinggalan terhadap perkembangan zaman yang cukup jauh.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa aplikasi IKD belum terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai lembaga pelayanan publik, sebagaimana disebutkan dalam penelitian Putra dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa aplikasi IKD belum terhubung dengan instansi seperti perbankan dan keimigrasian. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Christy dan Isbandono (2024) yang menunjukkan bahwa integrasi IKD sudah mulai diterapkan, seperti dalam pembukaan rekening di Bank Jatim dan BNI tanpa memerlukan KTP lokal, serta dalam berbagai program layanan sosial seperti Rutilahu, pemberian alat bantu, dan layanan perizinan di Dispendukcapil melalui sistem PTSP yang sudah terkoneksi dengan IKD. Penggunaan IKD juga telah diterapkan pada pembelian tiket kereta api di beberapa stasiun, serta integrasi data vaksinasi yang menggantikan peran aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai prosedur aktivasi serta manfaat IKD menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan jumlah aktivasi di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh temuan Romawati dkk. (2024) dan Putra dkk. (2014) yang menyatakan bahwa kurangnya penyebaran informasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kendala dalam meningkatkan cakupan penggunaan IKD. Padahal, IKD berfungsi untuk mempermudah berbagai proses pelayanan administrasi, seperti pendaftaran maupun perubahan data kependudukan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Rohmah (2023) yang menekankan bahwa efisiensi administrasi dapat tercapai karena pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah, serta mengurangi biaya operasional seperti transportasi dan penggandaan dokumen. Namun demikian, pelaksanaan aktivasi IKD juga masih dihadapkan pada kendala teknis seperti gangguan jaringan atau aplikasi yang sering mengalami server down, sebagaimana dijelaskan oleh Salsa Bella dan Widodo (2023), yang menyebutkan bahwa masalah jaringan menjadi hambatan dalam mengakses fitur-fitur dalam aplikasi IKD.

IV Kesimpulan

1. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Majene masih jauh dari target nasional, hanya mencapai 3,09%. Hal ini disebabkan kurangnya tindak lanjut pemerintah daerah. Pencapaian terbaik terjadi pada pelatihan aparat Disdukcapil, namun kesadaran masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi. Infrastruktur untuk layanan jemput bola juga belum memadai.
2. Hambatan pencapaian target IKD meliputi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan konektivitas dengan lembaga pelayanan publik, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran serta kemampuan teknologi masyarakat.
3. Upaya peningkatan aktivasi IKD meliputi layanan jemput bola ke sekolah dan perguruan tinggi, pemberian informasi langsung di kantor Disdukcapil, pengembangan layanan online melalui platform Discord "Sibaliparri", dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan IKD di sektor publik.

Keterbatasan Penelitian : Adapun Batasan yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Lokus sebagai studi kasus yang dipilih berdasarkan teori optimalisasi oleh Mardiasmo

Arah Masa Depan : Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih berada pada tahap awal, sehingga diperlukan langkah strategis lanjutan untuk mendukung optimalisasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merumuskan strategi sosialisasi yang lebih efektif, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya IKD, termasuk fungsi dan manfaatnya dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pelayanan publik. Upaya ini sebaiknya diikuti dengan penyusunan regulasi yang mendukung pemberlakuan dan pemanfaatan IKD secara luas. Penulis juga mendorong agar Disdukcapil dapat segera mengintensifkan sosialisasi terkait layanan aktivasi IKD secara daring, salah satunya melalui platform Discord 'Sibaliparri' yang telah dikembangkan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa proses aktivasi tidak harus dilakukan secara langsung di kantor, tetapi dapat diakses dari rumah masing-masing secara digital.

V Ucapan Terima Kasih

Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. selaku Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Ibu Dr. Imelda Hutasoit, M.Kes.,M.A selaku Ketua Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bapak Dr. Maris Gunawan Rukmana, S. IP., M. Si. Dosen Pembimbing terbaik yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan selalu memotivasi, serta mengarahkan penulis dari awal sampai dengan skripsi ini selesai. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Pelatih

dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah membekali peneliti dengan berbagai pengetahuan yang tak ternilai harganya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta seluruh Pegawai dan Staff yang berada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi. Keluarga saya terkhususnya kedua orang tua saya, kelima saudara saya dan saudara ipar saya yang selalu mendukung dan menemani saya. Segenap keluarga besar kontingen Sulawesi Barat. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Tuhan memberikan balasan yang lebih baik.

VI Daftar Pustaka

- Abrianto, D. D., & Fathurahman, H. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Masyarakat Wajib KTP-el di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 120–132.
- Akbar, M. F & Mohi W. K (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo : Ideas Publishing.
- Aprilia, R. R. V. ., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 9(19),645–650. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Edited by Rianayati Kusmini Pancasari and Achmad Fawaid. Edisi Keenam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djonny Pabisa, 2021. “Manajemen Pendidikan Kepamongprajaan Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara. Disertasi. Tondano: Universitas Negeri Manado
- Huberman, M., & Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif. *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Hutasoit, Imelda. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung : Alfabeta, cv
- Hutasoit, I., & Gaol, J. D. C. L. (2023). Implementation of Service Policy Electronic Identity Card in Hasundutan Humbang District North Sumatera Province. *Jurnal ARISTO (Sosial, Politik & Humaniora)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(02).
- Indrajit, Eko. 2016. *Electronic Government In Action*. Yogyakarta: Preinexus
- Lokabora, M. Y., & Fithriana, N. (2019). Inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(3).

- Madjid, U., Kawuryan, M., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 16(1), 48-61. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778>
- Mahknunah, L., & Choiriyah, I. U. (2021). Survei kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *International Journal on Human Computing Studies*, 3(2), 287–294. <https://media.neliti.com/media/publications/343918-survei-kepuasan-masyarakat-terhadap-kete-779893fb.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muthalib, A. (1977). *Kamus Bahasa Mandar-Indonesia*. Balai Bahasa Sulawesi Selatan.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2014). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Simangunsong, A. Benedictus. (2016). Interaksi Antar manusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan, *Jurnal ASPIKOM*, 3 (1), hlm 215,230
- Tayibnapis. 2008. *Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafa Armia Zafira, & Oktarizka Reviandani. (2024). Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Reslaj*:

Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(6), 3007–3014.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.2099>

Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18)43–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>

Winardi, (2014). Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem Bandung : Mandar Maju.

Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415–426. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>

